

PENGARUH IMPLEMENTASI KOMPETENSI APARATUR, PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA KECAMATAN LEBAKSIU

Ahmad Baedowi^{1*}, Fatkhuri²

¹² STIES Putra Bangsa Tegal

*Corresponding email: baedowia09@gmail.com, fatkhuri906@gmail.com

Abstrak: Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan pertanggungjawaban yang harus diwujudkan oleh pemerintahan desa. Guna mencapai hal tersebut, dibutuhkan kompetensi yang memadai agar aparatur mampu mengimplementasikan pengelolaan dengan produktif dan akuntabel. Selain kompetensi, faktor lain seperti pemanfaatan teknologi informasi serta tingkat partisipasi masyarakat juga memiliki kontribusi dalam mendukung terwujudnya akuntabilitas tersebut. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis hubungan antara kompetensi aparatur, penggunaan teknologi informasi serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Metode yang diterapkan menggunakan teknik kuantitatif dan data primer diperoleh dari hasil pengisian kuesioner responden. Subjek penelitian meliputi total aparatur desa di Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, sampel penelitian ditentukan melalui purposive sampling dengan total 30 responden. Analisis data dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS 27. Studi ini mengindikasikan bahwa kemampuan aparatur dan keterlibatan masyarakat tidak memberikan pengaruh signifikan dalam pengelolaan dana desa. Sebaliknya, penggunaan teknologi informasi terbukti berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci: Kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, akuntabilitas dana desa

***Abstract:** Accountability in village fund management is a responsibility that must be realized by village governments. To achieve this, adequate competency is required so that officials can implement management productively and accountably. In addition to competency, other factors such as the use of information technology and the level of community participation also contribute to supporting this accountability. This study aims to analyze the relationship between official competence, the use of information technology, and community participation in village fund management. The method used was quantitative, and primary data was obtained from questionnaires. The study subjects included all village officials in Lebaksiu District, Tegal Regency. The sample was determined through purposive sampling with a total of 30 respondents. Data analysis was conducted using SPSS 27. This study indicates that official competence and community involvement do not significantly influence village fund management. Conversely, the use of information technology has been shown to contribute significantly to improving village financial management.*

***Keywords:** Village official competence, community participation, information technology utilization, village fund accountability*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Desa di Indonesia menetapkan bahwa pembangunan desa memiliki peran strategis dalam memperkuat posisi desa sebagai subjek pembangunan. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi proses pengaturan dan pelaksanaan urusan desa, mengoptimalkan pembangunan sosial masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta memperkuat daya saing desa (Ismail et al., 2023). Contoh nyata dari implementasi kebijakan ini dapat dilihat melalui program pengembangan ekonomi lokal, seperti pendirian unit usaha desa yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa (Septiansyah & Kushartono, 2022). Tata Kelola keuangan desa dapat dikatakan transparan apabila seluruh prosesnya mengikuti prinsip dan prosedur yang benar, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pelaporan. Dalam konteks tersebut, akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme bagi aparatur publik untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan tindakannya sesuai prinsip etika dan tata kelola pemerintahan yang baik (Munidewi, 2017). Hasil penelitian Avellyni dan Handayani

(2021) menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas memiliki keterkaitan erat dengan efektivitas pengelolaan dana desa.

Aparatur desa berperan penting dalam memperkuat kapasitas masyarakat dan potensi lokal Sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa (Yesinia et al., 2018; Kusumaningrum et al., 2020). Di Kecamatan Lebaksiu, setiap desa memiliki delapan aparatur yang berwenang atas pengelolaan dana desa. Salah satu tugas utama aparatur adalah mengunggah dokumen APBDES melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai bentuk transparansi pemerintahan. Pemanfaatan sistem informasi terbukti mampu mendukung peningkatan kinerja, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja badan pemerintah (Karmila et al., 2014; Sugiarti & Yudianto, 2017; Zhou et al., 2021). Pada konteks tata kelola dana desa, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi keberhasilannya. Pertama, kompetensi aparatur desa yang meliputi kemampuan teknis dan manajerial dalam mengelola dana publik (Aulia, 2018). Kedua, tingkat partisipasi masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, transparansi pemerintah desa, dan kesempatan untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, penerapan teknologi informasi yang membantu dalam sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan yang valid. Kontribusi Masyarakat berperan sebagai faktor yang signifikan dalam memperkuat penerapan prinsip akuntabilitas di tingkat desa. Kontribusi Masyarakat meterlibatan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dapat mempercepat proses pembangunan sekaligus menghindari potensi penyimpangan penggunaan dana.

Berdasarkan uraian tersebut, fokus penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur, tingkat partisipasi masyarakat serta penggunaan teknologi informasi terhadap tingkat akuntabilitas dana desa di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.

LANDASAN TEORI

Kompetensi Aparatur Desa

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, kompetensi aparatur merupakan faktor fundamental yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dan tata kelola keuangan publik. Kompetensi aparatur mencakup kemampuan teknis, pengetahuan, serta sikap profesional yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas secara efektif. Menurut Juniarti dan Inapty (2022), kapasitas aparatur desa tidak hanya dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, tetapi juga oleh pemahaman akuntansi, pengalaman kerja, dan keterampilan administrasi yang memadai. Purba et al. (2022) menegaskan bahwa kompetensi aparatur desa memiliki hubungan erat dengan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi yang berdampak pada peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Aparatur desa yang memiliki tingkat keahlian tinggi akan lebih mampu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya (Anggraeni & Yuliani, 2019). Dengan demikian, akuntabilitas dapat terwujud apabila aparatur desa memiliki kemampuan untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik.

Ferina et al. (2016) menyatakan bahwa keterlibatan sumber daya manusia yang berkualitas sangat menentukan keakuratan dan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Mada et al. (2017), Aziiz dan Prastiti (2019), Karyadi (2019), Puspa dan Prasetyo (2020), Yulianti et al. (2019), Aulia (2018), serta Sugiarti dan Yudianto (2017) yang menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan kata lain, semakin tinggi kompetensi aparatur, semakin baik pula tingkat akuntabilitas yang dapat dicapai dalam pengelolaan dana publik di tingkat desa.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan warga dalam proses pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan. Dalam konteks pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat diwujudkan melalui musyawarah desa, forum diskusi, serta keterlibatan langsung dalam pemantauan pelaksanaan program. Tujuan utama partisipasi adalah agar pengelolaan dana desa dapat berjalan secara transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Menurut Perdana (2018), keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam pengambilan keputusan publik karena dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan memperkuat rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Dengan adanya partisipasi aktif, masyarakat dapat memberikan masukan serta melakukan kontrol sosial terhadap pengelolaan dana, sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran. Selain itu, penelitian Taufik dan Taufeni (2009), Aulia (2018), serta Medianti dan Larastika (2018) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin besar pula peluang tercapainya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian, peran masyarakat tidak hanya sebatas penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai pengawas dan mitra pemerintah desa dalam memastikan penggunaan dana desa dilakukan secara efisien dan bertanggung jawab.

Penggunaan Teknologi Informasi

Teknologi informasi didefinisikan sebagai penerapan berbagai komponen teknologi meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan pengguna yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, serta menyebarkan data menjadi informasi yang akurat dan relevan. Dalam konteks pemerintahan desa, penerapan teknologi informasi berfungsi sebagai sarana untuk mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas keuangan.

Arfiansyah dan Astuti (2020) menjelaskan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi di lingkungan pemerintah desa mampu memperbaiki efektivitas pencatatan, pelaporan, dan pengawasan dana publik. Pemanfaatan teknologi informasi juga membantu mengurangi risiko kesalahan manusia (human error) dalam pengelolaan data keuangan dan mempercepat proses penyusunan laporan pertanggungjawaban. Aulia (2018) menambahkan bahwa penggunaan perangkat lunak akuntansi dapat meningkatkan efisiensi dan menghemat waktu serta biaya dalam pelaporan keuangan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Yulianti et al. (2019), Anggraeni dan Yuliani (2019), serta Aziiz dan Prastiti (2019) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan kata lain, semakin optimal penggunaan teknologi informasi, maka semakin tinggi pula tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pengelolaan keuangannya.

METODE

Jenis Penelitian dan Deskripsi Populasi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antarvariabel secara sistematis melalui pengolahan data numerik. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran objektif terhadap fenomena yang diteliti dengan menggunakan data yang dapat diukur secara statistik. Data yang digunakan merupakan data primer, yaitu informasi yang diperoleh langsung dari responden melalui instrumen penelitian berupa kuesioner. Kuesioner tersebut dirancang untuk mengukur tingkat kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Populasi penelitian meliputi seluruh aparatur pemerintah desa di wilayah Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, bendahara, kepala seksi, serta staf urusan lainnya. Lokasi penelitian ini dipilih dengan

pertimbangan bahwa desa-desa di wilayah tersebut memiliki struktur organisasi, sistem administrasi, dan pengelolaan keuangan yang cukup representatif, serta mudah diakses oleh peneliti untuk memperoleh data yang relevan.

Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini Adalah purposive sampling, yakni teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang dianggap paling relevan dengan tujuan penelitian (Vitriany, 2020). Kriteria utama penentuan responden adalah individu yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Oleh karena itu, sampel penelitian terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala seksi, kepala urusan, dan perangkat lain yang memiliki tanggung jawab administratif maupun teknis terhadap pengelolaan dana desa. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 30 orang, yang dianggap mewakili populasi aparatur desa di Kecamatan Lebaksiu. Jumlah tersebut telah memenuhi syarat minimal untuk analisis statistik dasar menggunakan uji regresi linear.

Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner tertutup yang diisi langsung oleh para responden. Kuesioner disusun dengan menggunakan *skala Likert* lima poin, di mana responden diminta untuk memilih tingkat kesetujuan terhadap setiap pernyataan mulai dari:

- 1 = sangat tidak setuju,
- 2 = tidak setuju,
- 3 = netral,
- 4 = setuju, hingga
- 5 = sangat setuju.

Instrumen penelitian ini mencakup dua kelompok variabel utama:

Variabel dependen (Y) yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa, Variabel independen (X) yaitu kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung (tatap muka) kepada aparatur desa agar data yang diperoleh bersifat valid, lengkap, dan sesuai dengan konteks penelitian.

Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari kuesioner dianalisis secara kuantitatif menggunakan perangkat lunak SPSS versi 27. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan uji statistik untuk memastikan keakuratan dan validitas data. Langkah-langkah analisis yang digunakan meliputi:

Uji Validitas

Uji ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap item pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mampu mengukur konstruk yang dimaksud. Nilai korelasi antara skor item dengan total skor dihitung menggunakan Pearson Product Moment. Suatu item dinyatakan valid apabila r-hitung lebih besar dari r-tabel (pada $N = 30$ dan $\alpha = 0,05$, maka $r\text{-tabel} = 0,361$) atau jika nilai signifikansi ($p\text{-value}$) $< 0,05$.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsistensi internal instrumen penelitian. Uji ini dilakukan menggunakan *Cronbach's Alpha*, dengan kriteria: $\alpha \geq 0,90 \rightarrow$ sangat reliabel, $0,70 \leq \alpha < 0,90 \rightarrow$ reliabel, $0,60 \leq \alpha < 0,70 \rightarrow$ cukup reliabel, dan $\alpha < 0,60 \rightarrow$ tidak reliabel. Instrumen dinyatakan layak apabila memiliki nilai α minimal 0,70.

Uji Asumsi Klasik

Untuk memeriksa apakah data penelitian memenuhi syarat-syarat statistik regresi, seperti: Normalitas, tidak ada multikolinearitas, tidak ada heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

untuk memastikan distribusi data residual bersifat normal (p-value > 0,05).

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat apakah terdapat korelasi tinggi antarvariabel independen. Model dikatakan bebas multikolinearitas jika *Tolerance > 0,10 dan VIF < 10.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah varian residual bersifat homogen. Tidak terdapat heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi > 0,05 dan data pada grafik scatterplot menyebar secara acak.

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Model ini menghasilkan nilai koefisien regresi yang menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antarvariabel.

Menurut Sugiyono (2022), analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian karena berfungsi untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Proses analisis mencakup pengelompokan data, identifikasi pola hubungan antarvariabel, serta interpretasi hasil yang diperoleh secara empiris untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Validitas

		Correlations						Kompetensi Aparatur Pemerintahan desa
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
X1.1	Pearson Correlation	1	.640**	.721*	.447*	.553**	.623**	.818**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.013	.002	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X1.2	Pearson Correlation	.640*	1	.775**	.405*	.479*	.373	.820**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.027	.007	.042	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X1.3	Pearson Correlation	.721*	.775**	1	.591**	.560**	.534	.861**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.001	.001	.002	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X1.4	Pearson Correlation	.447*	.405**	.591**	1	.659**	.636	.727**
	Sig. (2-tailed)	.013	.027	.001		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X1.5	Pearson Correlation	.553**	.479**	.560**	.659**	1	.770**	.752**
	Sig. (2-tailed)	.002	.007	.001	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X1.6	Pearson Correlation	.623**	.373*	.534**	.636**	.770**	1	.775**
	Sig. (2-tailed)	.000	.042	.002	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30

Kompetensi Aparatur Pemerintah desa	Pearson Correlation	.818*	.820	.861	.727	.752	.775	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
 * . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

var x1	r-hitung	r-tabel	Keterangan
X1.1	.818**	0.361	Valid
X1.2	.820**	0.361	Valid
X1.3	.861**	0.361	Valid
X1.4	.727**	0.361	Valid
X1.5	.752**	0.361	Valid
X1.6	.775**	0.361	Valid

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Pemanfaatan teknologi Informasi
X2.1	Pearson Correlation	1	.856**	.949**	.777**	.712**	.697**	.961**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2.2	Pearson Correlation	.856*	1	.900**	.583**	.555**	.637**	.877**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001	.001	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2.3	Pearson Correlation	.949*	.900**	1	.711**	.658**	.675**	.943**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2.4	Pearson Correlation	.777*	.583**	.711**	1	.818**	.343	.792**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000		.000	.064	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2.5	Pearson Correlation	.712*	.555**	.658**	.818**	1	.616**	.829**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2.6	Pearson Correlation	.697*	.637**	.675**	.343**	.616**	1	.787**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.064	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Pemanfaatan teknologi Informasi	Pearson Correlation	.961*	.877**	.943**	.792**	.829**	.787**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

var x2	r-hitung	r-tabel	keterangan
X2.1	.961**	0.361	Valid
X2.2	.877**	0.361	Valid
X2.3	.943**	0.361	Valid
X2.4	.792**	0.361	Valid
X2.5	.829**	0.361	Valid

X2.6	.787**	0.361	Valid
------	--------	-------	-------

		Correlations						Partisipasi Masyarakat
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	
X3.1	Pearson Correlation	1	.304	.317	.588*	.502*	.544*	.709**
	Sig. (2-tailed)		.102	.088	.001	.005	.002	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X3.2	Pearson Correlation	.304	1	.740*	.665*	.796*	.864*	.822**
	Sig. (2-tailed)	.102		.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X3.3	Pearson Correlation	.317	.740*	1	.935*	.680*	.740*	.833**
	Sig. (2-tailed)	.088	.000		.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X3.4	Pearson Correlation	.588*	.665*	.935*	1	.736*	.800*	.922**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X3.5	Pearson Correlation	.502*	.796*	.680*	.736*	1	.796*	.872**
	Sig. (2-tailed)	.005	.000	.000	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X3.6	Pearson Correlation	.544*	.864*	.740*	.800*	.796*	1	.920**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Partisipasi Masyarakat	Pearson Correlation	.709*	.822*	.833*	.922*	.872*	.920*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

var x3	r-hitung	r-tabel	keterangan
X3.1	.709**	0.361	valid
X3.2	.822**	0.361	valid
X3.3	.833**	0.361	valid
X3.4	.922**	0.361	valid
X3.5	.872**	0.361	valid
X3.6	.920**	0.361	valid

		Correlations							Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	
Y1	Pearson Correlation	1	.678**	.548**	.683**	.618**	.618*	.407*	.688**
	Sig. (2-tailed)		.000	.002	.000	.000	.000	.026	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30

Y2	Pearson Correlation	.678**	1	.709**	.829**	.717**	.717*	.472*	.807**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.009	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Y3	Pearson Correlation	.548**	.709**	1	.866**	.756**	.756*	.497*	.904**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000		.000	.000	.000	.005	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Y4	Pearson Correlation	.683**	.829**	.866**	1	.756**	.756*	.497*	.838**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.005	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Y5	Pearson Correlation	.618**	.717**	.756**	.756**	1	.000*	.781*	.890**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Y6	Pearson Correlation	.618**	.717**	.756**	.756**	1.000**	1	.781*	.890**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Y7	Pearson Correlation	.407*	.472**	.497**	.497**	.781**	.781*	1	.714**
	Sig. (2-tailed)	.026	.009	.005	.005	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
B. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Pearson Correlation	.688**	.807**	.904**	.838**	.890**	.890*	.714*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

var y	r-hitung	r-tabel	keterangan
Y1	.688**	0.361	Valid
Y2	.807**	0.361	Valid
Y3	.904**	0.361	Valid
Y4	.838**	0.361	Valid
Y5	.890**	0.361	Valid

Y6	.890**	0.361	Valid
Y7	.714**	0.361	Valid

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap item pertanyaan dalam instrumen penelitian benar-benar dapat mengukur konstruk atau variabel yang diteliti. Berdasarkan hasil analisis menggunakan korelasi Pearson, seluruh item pertanyaan untuk variabel Kompetensi Aparatur Desa (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), Partisipasi Masyarakat (X3), serta Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) memiliki nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel (0,361) dengan nilai signifikansi (p-value) < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa semua indikator pada keempat variabel penelitian dinyatakan valid, artinya setiap butir pertanyaan konsisten dengan konstruk teoritis yang diukur. Dengan demikian, instrumen penelitian layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Reliability

X1

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.883	6

X2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.929	6

X3

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.896	6

Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.936	7

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai sejauh mana konsistensi internal dari setiap instrumen penelitian. Hasil pengujian dengan Cronbach's Alpha menunjukkan bahwa: Variabel Kompetensi Aparatur Desa (X1) memiliki nilai $\alpha = 0,883$, Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)* memiliki nilai $\alpha = 0,929$, Variabel Partisipasi Masyarakat (X3) memiliki nilai $\alpha = 0,896$, Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) memiliki nilai $\alpha = 0,936$. Seluruh nilai Cronbach's Alpha berada di atas 0,70, sehingga keempat variabel dapat dikategorikan reliabel. Artinya, setiap indikator dalam kuesioner menunjukkan t. tingkat konsistensi yang tinggi dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam analisis statistik selanjutnya.

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	31.033333

	Std. Deviation	2.71830471
Most Extreme Differences	Absolute	.186
	Positive	.186
	Negative	-.168
Test Statistic		.186
Asymp. Sig. (2-tailed)		.009 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Uji normalitas bertujuan untuk menilai apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,009. Karena nilai ini lebih kecil dari 0,05 ($0,009 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Meskipun demikian, penyimpangan ini masih dapat diterima karena jumlah sampel relatif kecil ($n = 30$) dan model regresi tetap dapat digunakan dengan catatan hasil interpretasi dilakukan secara hati-hati.

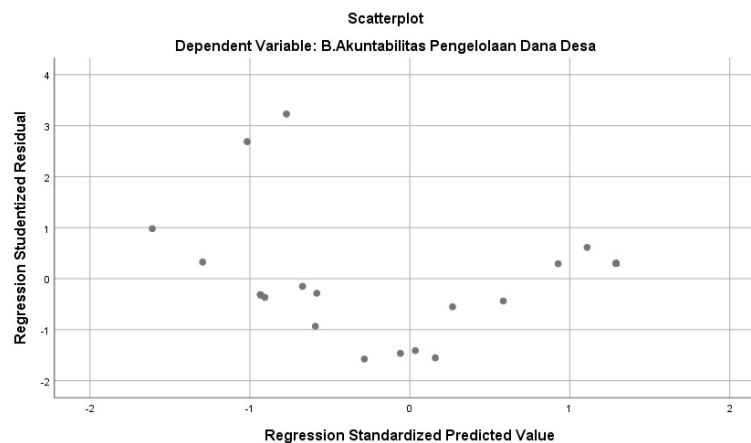
Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a	
Model		Tolerance	Collinearity Statistics VIF
1	Kompetensi Aparatur Pemerintahan desa	.163	6.119
	Pemanfaatan teknologi Informasi	.303	3.302
	Partisipasi Masyarakat	.105	9.496

Dependent Variable: B.Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi yang tinggi antarvariabel independen. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh: Seluruh nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada model regresi yang digunakan.

Uji Heteroskedastisitas



Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan bahwa varian residual pada model regresi bersifat homogen (konstan). Berdasarkan hasil analisis grafik scatterplot, titik-titik data menyebar secara acak di atas dan di bawah garis horizontal tanpa membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas, sehingga layak digunakan untuk pengujian hipotesis selanjutnya.

Uji Linear

a. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa * Kompetensi Aparatur Pemerintahan desa

ANOVA Table

			Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
B.Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa * Kompetensi Aparatur Pemerintahan desa	Between Groups	(Combined)	235.421	9	26.158	11.003	.000
		Linearity	187.654	1	187.654	78.937	.000
		Deviation from Linearity	47.767	8	5.971	2.512	.045
	Within Groups		47.545	20	2.377		
	Total		282.967	29			

Hasil uji linearitas menunjukkan nilai signifikansi untuk Deviation from Linearity sebesar $0,045 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kompetensi aparatur desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak bersifat linear. Artinya, peningkatan kompetensi aparatur tidak selalu diikuti oleh peningkatan akuntabilitas secara proporsional.

b. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa * Pemanfaatan teknologi Informasi

ANOVA Table

			Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
B.Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa * Pemanfaatan teknologi Informasi	Between Groups	(Combined)	227.866	7	32.552	12.997	.000
		Linearity	180.244	1	180.244	71.965	.000
		Deviation from Linearity	47.622	6	7.937	3.169	.021
	Within Groups		55.101	22	2.505		
	Total		282.967	29			

Pada pengujian hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, diperoleh nilai signifikansi untuk uji linearitas sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti terdapat hubungan linear yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi informasi, semakin besar pula tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

c. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa * Partisipasi Masyarakat

ANOVA Table

			Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
B.Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa * Partisipasi Masyarakat	Between Groups	(Combined)	229.355	4	57.339	26.738	.000
		Linearity	193.278	1	193.278	90.128	.000
		Deviation from Linearity	36.077	3	12.026	5.608	.004
	Within Groups		53.612	25	2.144		
	Total		282.967	29			

Hasil uji linearitas menunjukkan nilai signifikansi Deviation from Linearity sebesar $0,004 < 0,05$, yang menandakan bahwa hubungan antara partisipasi masyarakat* dan akuntabilitas pengelolaan dana desa juga tidak bersifat linear. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan akuntabilitas.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dapat disebabkan oleh

ketidaksiesuaian antara tingkat kompetensi individu dengan penerapan prosedur kerja yang akuntabel, atau kurang optimalnya pemanfaatan kemampuan aparatur dalam pelaksanaan tanggung jawab keuangan. Sementara itu, pemanfaatan teknologi informasi terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi mampu meningkatkan transparansi, mempercepat proses administrasi, dan meminimalkan kesalahan dalam pelaporan keuangan desa. Hasil ini konsisten dengan temuan Aulia (2018) dan Yulianti et al. (2019) yang menegaskan bahwa teknologi informasi berperan penting dalam menciptakan efisiensi dan keakuratan pengelolaan keuangan publik di tingkat desa. Adapun partisipasi masyarakat menunjukkan hubungan yang tidak linear terhadap akuntabilitas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingginya tingkat keterlibatan masyarakat tidak selalu diikuti dengan peningkatan akuntabilitas. Faktor yang mungkin memengaruhi hal ini adalah kualitas partisipasi yang belum merata, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap aspek teknis keuangan, atau rendahnya transparansi informasi dari pihak pemerintah desa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pengelolaan dana desa yang akuntabel tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu aparatur atau tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh optimalisasi teknologi informasi yang berperan sebagai alat pengendali, pelapor, dan penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lebaksiu tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, maupun pemanfaatan teknologi informasi secara simultan. Namun, dari ketiga variabel yang diteliti, pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi digital berperan penting dalam mendukung transparansi, efisiensi, serta keakuratan pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas, meskipun keduanya tetap menjadi faktor pendukung yang berpotensi memperkuat tata kelola pemerintahan desa apabila dioptimalkan secara berkelanjutan. Selain itu, ditemukan pula bahwa partisipasi masyarakat memiliki hubungan negatif signifikan terhadap hubungan antara kompetensi aparatur dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat yang tidak diimbangi dengan kapasitas dan koordinasi aparatur, maka potensi ketidakefektifan dalam pengawasan dana desa akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aikins, S. K. (2011). An examination of government internal audits role in improving financial performance. *Public Finance and Management*, 11(4), 306–321.
- Anggraeni, D., & Yuliani, N. (2019). Pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas keuangan desa. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Publik*, 8(2), 112–123.
- Aprilya, K. R. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gresik [Skripsi, STIESIA Surabaya].
- Arfiansyah, D., & Astuti, R. (2020). Penerapan sistem informasi akuntansi pada pemerintah desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344.
- Arifin, Z. (2012). *Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, 10(1), 14–25.
- Atmadja, A. T., Saputra, K. A. K., & Koswara, M. K. (2018). The influence of village conflict, village apparatus ability, village facilitator competency, and commitment of local government on the success of budget management. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(1), 1–12.
- Aulia, P. (2018). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten 50 Kota [Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau].
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas dana desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ismail, A., Rahman, T., & Nurhayati, S. (2023). Efektivitas pembangunan desa dalam perspektif Undang-Undang Desa. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 5(1), 45–59.
- Jatengprov.go.id. (2018). Tahun 2018 Wajib Implementasi Siskeudes Secara Penuh. Diakses dari <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/2018-wajib-implementasi-siskeudes-secarapenuh/>
- Karmila, D., Pratiwi, H., & Yudianto, I. (2014). Pemanfaatan teknologi informasi terhadap efektivitas kerja aparatur pemerintahan. *Jurnal Teknologi dan Administrasi Publik*, 3(2), 75–83.
- Karyadi, A. (2019). Pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 9(2), 90–102.
- Kusumaningrum, D., Yuliani, D., & Rachmawati, F. (2020). Kompetensi aparatur dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Aset Publik*, 12(1), 88–98.
- Mada, R., Suharti, E., & Ningsih, W. (2017). Kompetensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Akuntansi Publik*, 5(1), 1–10.
- Munidewi, F. (2017). Akuntabilitas sebagai prinsip etika dalam kinerja pemerintahan publik. *Jurnal Etika dan Kebijakan Publik*, 4(2), 55–64.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162–172.
- Perdana, K. W. (2018). Partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik di desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 5(3), 45–57.
- Purba, D., Sitorus, E., & Gultom, R. (2022). Kompetensi aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa. *Jurnal Akuntabilitas dan Tata Kelola Desa*, 4(1), 33–42.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2009). *Organizational Behavior* (13th ed.). USA: Pearson International Edition, Prentice Hall.
- Rosyidi, M. (2018). Pengaruh transparansi, kompetensi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Online Mahasiswa FEB*, 1(1), 1–15.

- Safrizal. (2018). Pengaruh otonomi desa, partisipasi masyarakat, kompetensi, komitmen aparatur desa, transparansi, dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Online Mahasiswa FEB*, 5(2), 120–130.
- Septiansyah, A., & Kushartono, E. (2022). Pengembangan ekonomi lokal melalui BUMDes dan wisata desa. *Jurnal Ekonomi dan Pemberdayaan Desa*, 3(2), 67–77.
- Sugiarti, R., & Yudianto, I. (2017). Pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20.
- Sulina, N., Rachman, F., & Lestari, P. (2017). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan Daerah*, 4(1), 21–30.
- Taufik, M., & Taufeni, A. (2009). Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. *Jurnal Ekonomi dan Administrasi Publik*, 6(1), 30–38.
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105–112.
- Yulianti, R., Pratama, E., & Yudianto, I. (2019). Pemanfaatan teknologi informasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi Publik*, 7(3), 180–190.
- Zhou, L., Han, J., & Zhang, Y. (2021). The role of digital governance in enhancing public accountability. *Journal of Public Administration and Information Technology*, 9(4), 245–260.